

LAPORAN AKHIR

**PENILAIAN *ECO-HEALTH* TERHADAP KLASTER PRODUKSI UNGGAS
UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PETERNAK UNGGAS SKALA KECIL**



Tim Peneliti:

Nyak Ilham

Yusmichad Yusdja

Edi Basuno

Enny Martindah

Ratu Ayu Dewi Sartika

**PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN – REPUBLIK INDONESIA**

Bekerjasama dengan

INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTRE CANADA

2013

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENDAHULUAN

01. Peningkatan pendapatan dan jumlah penduduk meningkatkan permintaan terhadap produk ternak termasuk unggas. Kondisi ini mendorong peningkatan produksi yang memberikan kesempatan kerja dan sumber pendapatan kepada produsen unggas skala kecil. Namun, dalam perkembangannya, persaingan usaha yang makin meningkat dan dibutuhkan produk berstandar biosekuriti yang tinggi menyebabkan sebagian pangsa pasar dikuasai oleh produsen industri skala besar, sehingga menekan peternak skala kecil di pasar.
02. Untuk berkembang menjadi usaha skala besar yang memenuhi standar, produsen kecil menghadapi berbagai kendala institusional, politik, teknis, dan finansial. Permasalahan ini dapat diatasi dengan cara mengintegrasikan produsen skala kecil dengan produsen skala besar. Setelah wabah AI, sebagai salah satu alternatif, negara-negara Asia mempromosikan pembangunan kluster produksi unggas (PPC) sebagai wahana untuk mendorong produsen skala kecil meningkat menjadi produsen ternak intensif dengan standar yang baku.
03. Pada tahun 2006, di Indonesia dikembangkan Kluster Peternakan Unggas Pedesaan atau *Village Poultry Farming* (VPF). VPF bertujuan mengembangkan sentra produksi unggas di daerah pedesaan, dengan menerapkan praktek budidaya yang baik sebagai upaya untuk menekan wabah penyakit unggas, khususnya produsen unggas di sektor-4.
04. Pada sisi lain, sejak tahun 1981 telah berkembang Kluster Produksi Unggas (PPC) sebagai dampak dari berbagai intervensi pemerintah pada industri ayam ras yang melibatkan perusahaan sebagai inti dan peternak sebagai plasma dalam kerjasama kemitraan. Pertumbuhan PPC ini tidak dapat diabaikan sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan bagi masyarakat miskin. Seharusnya pemerintah tidak mengabaikan kenyataan ini. Sejauh ini, belum ada studi yang mengkaji berbagai dampak akibat keberadaan PPC.
05. Penelitian ini bertujuan: (i) mengkaji dampak PPC pada status sosial-ekonomi para produsen skala kecil dan kesehatan mereka yang spesifik berkaitan dengan munculnya penyakit zoonosis, (ii) mengetahui perubahan sikap, perilaku dan hubungan antar berbagai kelompok stakeholder yang disebabkan oleh perkembangan PPC berkaitan dengan munculnya penyakit. Dari dua tujuan akan dilakukan intervensi *ecohealth* di lokasi percontohan untuk meningkatkan kesejahteraan produsen skala kecil dan untuk mengurangi risiko munculnya penyakit di PPC. Penelitian ini secara tidak langsung juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pembuat kebijakan, peneliti, praktisi, dan masyarakat dalam menerapkan pendekatan *ecohealth* untuk mengatasi EID, serta mengembangkan rekomendasi kebijakan dan praktek terbaik (*good practices*) untuk meningkatkan PPC dalam rangka mengintegrasikan produsen skala kecil menuju rantai nilai yang bernilai tinggi dan unggas yang dapat menjamin keamanan pangan?
06. Lokasi penelitian di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang, Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat-Indonesia. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara, FGD, observasi dan Uji laboratorium. Data diolah dan dianalisis dengan pendekatan ekonometrika dan pendekatan deskriptif. Responden yang diwawancarai terdiri dari berbagai komponen, yaitu: pengambil kebijakan dari berbagai level, petugas peternakan, petugas kesehatan, peternak, perusahaan inti, dan kelompok masyarakat yang berjumlah 413 orang.

HASIL PENELITIAN

07. Dari tiga pola usaha unggas, yaitu usaha kerjasama dengan *risk sharing*, usaha kerjasama dengan pola maklun dan usaha unggas mandiri, peternak yang berusaha dengan pola maklun makin meningkat. Peternak yang masih berusaha dengan pola mandiri juga berharap dapat bergabung dengan perusahaan inti untuk berusaha dengan pola maklun.
08. Responden yang sebagian besar (82%) berusaha dengan pola maklun baik yang berusaha dalam PPC maupun di luar PPC, sebagian besar (49%-74%) pendapatan rumah tangganya berasal dari usaha unggas. Ini berarti keberadaan PPC tidak bisa diabaikan.
09. Kehadiran PPC di daerah pedesaan tidak memberikan dampak kesejahteraan peternak yang lebih baik dibandingkan dengan peternak Non PPC. Namun demikian PPC telah memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam hal membuka kesempatan kerja, memperoleh bahan pangan bergizi yang murah, dan mampu menggerakkan perekonomian pedesaan.
10. Dari aspek kesehatan ternak, keberadaan PPC diharapkan dapat memudahkan dalam mengontrol penyebaran penyakit menular, lebih mudah dalam menerapkan "all In – all Out", dan memudahkan dalam menerapkan biosekuriti dengan baik berdasarkan petunjuk dari perusahaan inti.
11. Kesadaran para peternak dalam menerapkan standard biosekuriti di PPC pada peternakan unggas sangat rendah. Hasil observasi rata-rata nilai biosekuriti adalah 18 di PPC Subang, 9.97 di Sukadana dan 7.4 di Baregbeg. Apabila biosekuriti diterapkan secara optimal akan memberikan nilai tertinggi 42 poin, ini berarti penerapan biosekuriti di lokasi penelitian bila mengacu pada 14 indikator kurang dari 50%.
12. Selain memberi manfaat positif, keberadaan PPC ternyata berpotensi memberikan dampak negatif, diantaranya bau yang menyengat dari gas ammonia yang dihasilkan, meningkatnya populasi lalat, kebisingan hiruk pikuk lalu-lintas mengangkut input dan output produksi.
13. Bau menyengat dan meningkatnya populasi lalat di pemukiman akibat keberadaan PPC mengganggu kenyamanan penduduk. Namun belum mengganggu keharmonisan hubungan masyarakat peternak dan bukan peternak. Akan tetapi sudah ada perasaan kurang senang walaupun tidak diungkapkan secara langsung dari sebagian masyarakat bukan peternak.
14. Dampak keberadaan PPC terhadap polusi air terutama terhadap pencemaran mikroorganisme berbahaya tidak terbukti. Contoh air di lokasi penelitian telah diuji terhadap kandungan mikroorganisme *Salmonella* spp dan *Colliform*. Hasil laboratorium pada sampel air yang diambil dari mata air, sumur gali, sumur pantek, kolam, selokan semuanya negatif salmonella spp, dan hasil untuk colliform pada kisaran <3 MPN/ml – 27 MPN/ml. Pada level ini air masih aman untuk unggas, akan tetapi apabila untuk konsumsi manusia harus direbus/dimasak lebih dahulu.
15. Menurut informan baik ibu balita maupun petugas kesehatan menyatakan bahwa keberadaan PPC tidak berhubungan dengan kasus penyakit ISPA, diare dan kulit pada anak balita. Keluhan tentang polusi bau dikarenakan lokasi kandang yang sangat dekat dengan pemukiman, sementara penanganan limbah tidak dilakukan dengan baik. Penyakit ISPA dan diare pada anak balita lebih disebabkan oleh faktor cuaca (musim hujan). Penyebab diare lebih disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan penerapan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat). Khusus Di Desa Sukamulya,

kecamatan Barebeg, Kabupaten Ciamis, kasus diare berulang yang terjadi pada anak balita serta menderita sakit kulit kemungkinan disebabkan oleh penggunaan air yang tercemar serta rendahnya pengetahuan tentang PHBS. Dilihat dari banyaknya kasus ISPA dan diare di tiga lokasi penelitian selama tahun 2012 tidak menunjukkan kejadian luar biasa (KLB) atau angka masih dianggap normal.

16. Para *stakeholder* memiliki aspirasi yang baik, artinya sesuai dengan kondisi negara dalam pengentasan kemiskinan saat ini di mana PPC memiliki peran yang besar karena dapat menggerakkan perekonomian desa, namun diiringi oleh dampak pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan ancaman konflik sosial. Namun demikian, dalam menanggapi masalah pencemaran lingkungan, belum terjadi konflik sosial yang parah, masih pada taraf yang ringan. Hal ini disebabkan aspirasi mereka yang baik terhadap kehadiran PPC. Atas dasar itu mereka berpendapat belum perlu melakukan perubahan sikap perilaku baik internal *stakeholder* maupun antar *stakeholder*. Namun demikian, ada kecenderungan bahwa kebencian sebagian masyarakat terhadap kerusakan lingkungan bisa tumbuh lebih besar dari sikap baik terhadap PPC. Hal ini dapat menjadi api dalam sekam yang setiap saat dapat muncul ke permukaan.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

17. Pemerintah perlu membangun banyak PPC tetapi dengan tetap awas terhadap kebutuhan masyarakat secara umum terhadap *ecohealth*. Pemerintah membangun kompleks peternakan yang kemudian diserahkan kepada peternak, yang dibayar dengan mencicil dan sebagainya. Jika pemerintah yang membangun kompleks PPC tersebut diharapkan tercapai ketertiban dalam pemeliharaan dan kerjasama antara peternak dalam kebersihan lingkungan serta menghasilkan bahan pangan yang aman dan sehat.
18. Pemerintah disarankan turut aktif dalam pembinaan kerjasama antara Perusahaan Inti dan Peternak terutama menjamin keadilan bagi peternak plasma dan menjamin tidak terjadi pencemaran lingkungan. Dengan peran pemerintah di dalam hal ini, akan dapat diharapkan muncul PPC yang bermanfaat bagi masyarakat desa secara keseluruhan.
19. Untuk meningkatkan keberlangsungan PPC dan meningkatkan kenyamanan penduduk setempat. Diharapkan pihak perusahaan inti dan Kelompok Peternak dapat menerapkan *Good Farming Practices* (GFP) untuk menekan bau menyengat, mengurangi populasi lalat, dan mengurangi sisa pembakaran untuk penghangat ayam (*brooder*). Percepatan penerapan GFP diantaranya dapat dilakukan melalui pelatihan kepada para peternak.
20. Pemerintah harus segera turun tangan termasuk *stakeholder* yang terkait mengatur PPC sehubungan dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya. Pencemaran lingkungan tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan melakukan manajemen dan teknologi pemeliharaan yang tepat dan bersungguh-sungguh. Tindakan yang cepat dan segera sangat dibutuhkan untuk mencegah munculnya api dalam sekam artinya mencegah konflik sosial yang sangat parah.
21. Kerjasama antara pemerintah, Kelompok masyarakat dan *stakeholder* lainnya sangat dibutuhkan supaya pelaksanaan dan pengawasan pencemaran lingkungan dapat dikontrol. Kerjasama antar *stakeholder* ini yang sangat dibutuhkan saat ini adalah pemerintah desa/kecamatan, perusahaan inti, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Lembaga Penyuluhan dan Kelompok Peternak bersama dengan wakil-wakil masyarakat pedesaan PPC.